

TERKENDALI

**DOKUMEN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMELIHARAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
BULAN JUNI
2022**

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Akreditasi penjaminan mutu (APM) Badan Peradilan Umum, telah memiliki standar minimal akreditasi B dan maksimal A, tantangan berikutnya adalah bagaimana pengadilan dapat mempertahankan standar tersebut, bahkan meningkatkan hingga seluruh pengadilan mencapai standar yang tertinggi, yakni Akreditasi A.

Pada kenyataannya banyak pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi akreditasi khususnya akreditasi A, terlena dan abai mempertahankan capaian yang telah diraihny. Hal ini dibuktikan pada saat Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan kunjungan, tinjauan ataupun inpeksi mendadak di beberapa Pengadilan, ditemukan beberapa pengadilan yang telah mendapatkan Akreditasi A sudah tidak lagi menyangand akreditasi A karena fermormal kinerja dan pemeliharaan system yang sudah jauh menurut kualitasnya. Padahal sesuai konsep awal APM adalah bentuk pembinaanyang terstruktur, sistemik dan berkesinambungan yang artinya implementasi APM tidak berhenti manakala pengadilan sudah menerima sertifikat akreditasi tetapi harus menerus memelihara pasca penerimaan sertifikat akreditasi.

II. Dasar Hukum

1. Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016 tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjamianan Mutu Badan Peradilan Umum.
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 22335/DJU/SK/OT.01.3/12/12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjamianan Mutu Badan Peradilan Umum.

III. Tujuan

Tujuan dilakukan pemeliharaan penilaian akreditasi penjamianan mutu (APM) agar Pengadilan dapat :

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum, kepegawaian, perencanaan danpelaporan
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara;

IV. Ruang Lingkup

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan akreditasi penjaminan mutu (APM) berupa pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggara peradilan, dengan menggunakan Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pemeliharaan akreditasi penjaminan mutu (APM) dilakukan atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, kepada :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Hakim
6. Bagian Kepaniteraan:
 - a. Kepaniteraan Perdata
 - b. Kepaniteraan Pidana
 - c. Kepaniteraan Hukum
7. Bagian Kesekretariatan:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Informasi, Pelaporan (PTIP)
8. Panitera Pengganti
9. Jurusita

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI PEMELIHARAAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

A. MONITORING

Terdapat beberapa temuan dari hasil Pemeriksaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B periode semester I pada tahun 2022, antara lain:

I. AREA TOP MANAGER

1. Belum terdapat usulan terkait agen perubahan oleh masing-masing pimpinan unit kerja kepada Tim ZI;
2. Belum ada rencana Tindak Agen Perubahan;
3. Monev Tindak Agen Perubahan belum dilaporkan kepada pimpinan.

II. AREA MANAGER REPRESENTATIVE

1. Dokumen laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja Tim APM dan kebutuhan apapun untuk dsikoreksi/perbaiki belum sepenuhnya terpenuhi (telah dibuat namun belum lengkap dikarenakan wakil ketua baru).

III. AREA SEKRETARIS DAN DOCUMENT CONTROL

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum dilaporkan secara tertulis kepada KPT setiap bulan;
2. Belum ada SK Tim Pengelola Website.

IV. AREA PANITERA

1. Dokumentasi Monev Delegasi masuk/keluar pada bulan Juni belum siap;
2. Rapat evaluasi kinerja kepaniteraan bulan Juni belum ada.

V. AREA HAKIM

1. Majelis hakim belum melakukan monitoring terhadap publikasi seluruh putusannya pada direktori putusan;
2. Majelis hakim setiap bulannya belum melakukan monitoring terhadap anonimisasi putusannya yang dipublikasikan pada direktori putusan.

VI. AREA PANMUD HUKUM

1. Belum dapat dilaksanakan pengiriman berkas laporan monitor dan evaluasi kepada Ditjen Badilum;
2. Belum ada reward dan punishment untuk petugas PTSP berdasarkan evaluasi hasil penilaian harian.

VII. AREA PANMUD PERDATA

1. Masih ada penyerahan berkas perkara inactive dari kepaniteraan perdata kepada kepaniteraan hukum yang belum dilaksanakan tepat waktu lebih dari 3 (tiga) hari setelah BHT (dalam BA serah terima berkas)

VIII. AREA PANMUD PIDANA

1. Belum dapat dilaksanakan pengiriman berkas laporan monitor dan evaluasi kepada Dirjen Badilum.
2. Belum dilaksanakan pengiriman berkas perkara permohonan kasasi (ditahan) paling lambat 3 (tiga) hari setelah memori kasasi diterima.

IX. AREA JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

NIHIL

X. AREA PANITERA PENGGANTI

1. Penginputan BA Sidang ke SIPP belum sesuai dan belum selesai.

XI. AREA KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

1. Belum ada SK KPN tentang bpemberian penghargaan/reward;
2. Belum ada penghargaan / reward untuk ASN.

XII. AREA UMUM DAN KEUANGAN

1. Uraian tugas dan papan struktur organisasi belum diupdate;
2. Laporan papan realisasi anggaran DIPA 01 dan 03 belum di update;
3. Belum ada Kartu Perawatan Genset;
4. Belum ada anggaran bahan bakar dan pemeliharaan genset;
5. DBR pada ruangan umum dan keuangan, hukum, dan hakim belum diupdate;
6. PC pengadaan tahun 2022 belum ada label BMN.

XIII. AREA PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

1. Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu pembebasan biaya perkara (prodeo) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 belum ada inovasi.

B. EVALUASI

Hasil temuan Audit Internal telah terpenuhi dan data dukung telah dilengkapi serta diperbaharui di Document Control, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilakukan perbaikan dan dilakukan pembenahan terhadap hal-hal yang belum sesuai dengan prosedur dan atau ketentuan yang berlaku.

Bantul, 14 Juni 2022

Quality Manager Representative (QMR)


KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.HUM.

NOTULEN RAPAT KEPANITERAAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
BULAN APRIL 2022

Hari : Jumat
Tanggal : 22 APRIL 2022
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bantul
Agenda : Rapat Rutin (Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Kepaniteraan Pidana)
Dihadiri oleh : Hakim Pengawas Bidang dan semua staf kepaniteraan Pidana

Agenda Rapat

- ❖ Rapat dibuka oleh Panitera Muda Pidana.
- ❖ Agenda rapat intern kepaniteraan Pidana adalah membahas :
 - I. Tindak lanjut dari hasil Pengawasan Hakim Pengawas bulan Maret 2021:
 - Ada perkara pidana yakni Nomor 315/Pid.B/2021/PN Btl dalam sistem SIPP telah dimutasi pada bulan Januari namun berkas fisik belum diterima oleh Kepaniteraan Pidana.
Tindak lanjut : Sudah ditindak lanjuti kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Panitera Pengganti sudah bersedia memperbaiki Berita Acara yang revisi.
 - Sarana prasarana ruangan Kepaniteraan Pidana berupa pendingin ruangan AC tidak berfungsi.
Tindak lanjut : sudah di laporkan kepada bagian terkait dan sudah di perbaiki tetapi hasilnya belum maksimal.
 - II. Monitoring evaluasi uraian tugas dan kendala pelaksanaan tugas kepaniteraan Pidana sebagai berikut:
 1. RIDWAN NUGROHO.A., S.H. yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
 - Tugas di Kepaniteraan Pidana membantu dibagian Upaya Hukum Kasasi tidak ada kendala, Bulan April ada 3 Perkara yang mengajukan Kasasi :
 - a. Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Btl.
 - b. Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Btl.
 - c. 279/Pid.Sus/2021/PN Btl

- hanya saja untuk pengiriman Berkas Kasasi tidak menggunakan barcode dikarenakan untuk login ke direktori Putusan masih susah dan sudah ditanyakan di MA berkas dapat dikirim secara manual tanpa barcode dengan diberikan catatan Direktori putusan sedang error.
2. AANG PRABOWO, S.H., yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut
 - Tugas-tugas membantu Kepaniteraan Pidana semua lancar.
 3. RIMBANG KRISDIYANTO, S.H., yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Pada dasarnya tugas-tugas membantu di Kepaniteraan Pidana berjalan lancar tidak ada kendala;
 - Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan sudah semua ditindak lanjuti, lancar tidak ada kendala;
 - Input data dalam SIPP untuk Upaya Hukum Banding, Kasasi lancar hanya saja untuk pengiriman Kasasi, tidak dapat menggunakan barcode karena direktori putusan MA sedang trouble;
 4. HENDRI WIJAYA, S.H., yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut
 - Untuk tugas membantu Kepaniteraan Pidana, membantu Upaya Hukum, untuk Upaya Hukum Banding lancar, bulan April ada 3 Perkara yang mengajukan Banding :
 - a. Nomor 50/Pid.B/2022/PN BII.
 - b. Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN BII
 - c. Nomor 6/Pid.B/2022/PN BIItidak ada kendala
 - AC pada ruangan tidak berfungsi dengan baik, ruangan terasa panas
 5. SUYATINI, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
 - Tugas membantu di Kepaniteraan Pidana semua berjalan dengan lancar tidak ada kendala;
 - Semua Register Upaya Hukum sudah terisi;
 - AC di ruangan tidak berfungsi maksimal, ruangan terasa panas
 6. ANNISA FAUZIAH, A.Md.AB
 - Pengisian register induk perkara Pidana dan petugas PTSP dibantu Mba Reny karena saya sebagai petugas register sedang melaksanakan diklat untuk beberapa bulan ini
 7. RENY WIJAYANTI, S.H.
 - Saya masih dalam tahap pembelajaran menjadi petugas PTSP, namun permasalahan aman terkendali hanya saja masih ada berkas persyaratan insus yang diajukan masih kurang.
- ❖ PENGARAHAN DARI HAKIM PENGAWAS
- Yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Untuk Upaya hukum Banding, Kasasi jangan sampai terlambat dalam pengirimannya
 2. Untuk berkas persyaratan insus yang diajukan masih kurang, harus disesuaikan dengan ceklist pelayanan di Kepaniteraan Pidana dan semua jenis layanan harus sesuai

dengan prosedur, apabila ada kekurangan kelengkapan tidak sesuai dengan buku harus dikembalikan, untuk dilengkapi;

3. Untuk diperhatikan berkas arsip perkara yang telah putus, namun belum ada di kepaniteraan pidana agar segera ditindak lanjuti lagi ke panitera pengganti yang bersangkutan
4. Segera informasikan kepada bagian umum mengenai AC yang tidak berfungsi maksimal

❖ Selanjutnya rapat ditutup oleh Panitera Muda Pidana

Bantul, 22 April 2022

Panitera Muda Pidana



YUNTARININGSIH, S.H.

Notulis/Rapat



ANNISA FAUZIAH, A.Md.AB

Mengetahui,
Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum



GATOT RAHARJO, S.H., M.H.



PRESENSI RAPAT RUTIN
KEPANITERAAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bahar Poloh	lt	A
2	Lumutan	Pan Mus Pid	[Signature]
3	Hardi Wijaya	PP	[Signature]
4	Suyatni	JSP	Suyatni
5	Wawan Ari Prabowo		G
6	Dimbang. t	PP	[Signature]
7	Annisa Fauziah	Staf.	[Signature]
8	Reny W.	Staf	Reny



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl.Prof.Dr SOEPOMO,S.H.No.4 BANTUL- DIY 55712
Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

Perihal : Undangan

Kamis, 21 April 2022

Kepada : Yth.

STAF KEPANITERAAN PIDANA

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 22 April 2022

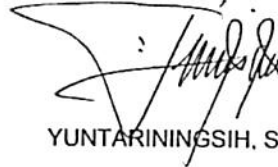
Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Kepaniteraan Pidana

Agenda : Rapat Rutin (Monitoring dan Evaluasi Tupoksi di
Kepaniteraan Pidana dan tindak lanjut dari Hasil
Pengawasan Hakim Pengawas Bidang)

Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Panitera Muda Pidana



YUNTARININGSIH, S.H.

**Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi
Tupoksi Kepaniteraan Pidana
Jumat, 22 April 2022**







PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr SOEPOMO, S.H.No.4 BANTUL- DIY 55712

Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK
UNTUK PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK SESUAI SEMA No 1 tahun 2014**
Kepaniteraan Pidana Bulan MEI 2022

Nomor	TEMUAN
1.	Ada sebagian berkas pengiriman upaya Hukum Kasasi tidak menggunakan barcode pada direktori Putusan
2.	Ada sebagian upaya hukum Kasasi dokumen elektronik tidak lengkap
3.	Belum ada SOP upaya Hukum Kasasi dan PK dengan Dokumen elektronik

A. Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



Bantul, 31 Mei 2022

Panitera

KASPENDI SEMBIRING, S.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr SOEPOMO, S.H.No.4 BANTUL- DIY 55712

Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL MONITORING DAN EVALUASI

**PENGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK
UNTUK PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK SESUAI SEMA No 1 tahun 2014
Kepaniteraan Pidana Bulan MEI 2022**

No.	TEMUAN	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
1.	Ada sebagian berkas pengiriman upaya Hukum Kasasi tidak menggunakan barcode pada direktori Putusan	Untuk upaya Hukum Kasasi sebagian ada yang sudah menggunakan direktori putusan dan sudah mendapatkan barcode tetapi sebagi yang tidak menggunakan barcode dikirim secara manual dikarenakan Direktori Putusan sering mengalami kendala	Screenshoot direktori putusan
2.	Ada sebagian upaya hukum Kasasi dokumen elektronik tidak lengkap	Untuk kelengkapan dokumen elektronik terkendala softcopy yang tidak dikirimkan dari pihak pemohon upaya Hukum	Screenshot SIPP
3.	Belum ada SOP upaya Hukum Kasasi dan PK dengan Dokumen elektronik	proses penyusunan SOP upaya Hukum Kasasi dan PK dengan Dokumen elektronik.	SOP Kasasi dan PK dari BADILUM sebagai acuan

K Panitera Pengadilan Negeri Bantul

KASPENDI SEMBIRING, S.H.

Bantul, 31 Mei 2022.

P Panitera Muda-Ridana

J
YUNTARINGSIH, S.H



K Kertika Pengadilan Negeri Bantul
S.H.M.H.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Jl. Prof. Dr SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL - DIY 55712
Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

**MONITORING DAN EVALUASI
PENOMORAN PERKARA DAN TEMPLATE PUTUSAN
SUDAH SESUAI SK KMA NO 44 TAHUN 2014**

Nomor	URAIAN	TEMUAN
1.	Monitoring dan Evaluasi penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai SK KMA No 44 Tahun 2014	sudah sesuai SK KMA No 44 Tahun 2014
2.	Template putusan	sudah sesuai SK KMA No 44 Tahun 2014
3.	Template putusan sudah menggunakan SIPP	sudah sesuai SK KMA No 44 Tahun 2014

Mengetahui
Wakil Ketua,


KURNIAWAN WIJONARTO, S.H.M.Hum

Bantul, 31 Mei 2022.
Panitera,


KASPENDI SEMBIRING, S.H



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr SOEPOMO, S.H.No.4 BANTUL- DIY 55712

Telp/Faks : (0274) 367348 Laman: www.pn-bantul.go.id

**TINDAK LANJUT PENOMORAN PERKARA DAN TEMPLATE PUTUSAN
SUDAH SESUAI SK KMA NO 44 Tahun 2014**

No.	TEMUAN	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
1.	NIHIL	NIHIL	-

Mengetahui
Wakil Ketua,


KURNIAWAN WIJARTO, S.H.M.Hum

Bantul, 31 Mei 2022.

Panitera,


KASPENDI SEMBIRING, S.H